

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2020.
- Cahyaningsuci, D.M. 2015. Pengaruh Karakteristik Peternak Terhadap Tingkat Pendapatan peternak Sapi Potong di Kabupaten Wonogiri. Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Darmawi, D. 2011. Pendapatan usaha pemeliharaan sapi Bali di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan. XIV (1) : 14-22.
- Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. 2020. Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bungo Tahun 2019.
- Dina, G.A. 2016. Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Ternak Sapi Potong di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Skripsi. Fakultas Peternakan, Universitas Jambi, Jambi.
- Erwin, A.P dan D. S. Ratih S. 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media.
- Hariyoso, S. 2002. Dasar-dasar Manajemen dan Administrasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kanisius, A.A. 2002. Kawan Beternak. Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Manan, B. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Maryam., M.B. Paly, dan Astati. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penentu pendapatan usaha peternakan sapi potong (studi kasus Desa Otting Kabupaten Bone). Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan. 2 (3) : 79-101.
- Nugroho, R. 2008. Kebijakan Publik. Jakarta: Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan.
- Pinardi, D., A. Gunarto dan Santoso. 2019. Perencanaan lanskap kawasan penerapan inovasi teknologi peternakan prumpung berbasis ramah lingkungan. Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu. 7 (2) : 251-262.

- Purwanto, E. A. dan D.R. Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rianto, E dan Purbowati, E. 2009. Panduan Lengkap Sapi Potong. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Saputri, E., A. Hakim, dan I. Noor. 2015. Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 4 (3): 1-10.
- Solichin, W. A. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sonbait, L.Y. K.A. Santosa, Panjono. 2011, Evaluasi Program Pengembangan Sapi Potong Gaduhan Melalui Kelompok Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Papua Barat. Buletin Peternakan. 35 (3) : 208-217.
- Sunggono, B. 2004. Kebijakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Y., D.S. Priyarsono dan S. Mulatsih. 2014. Pengembangan peternakan sapi potong untuk peningkatan perekonomian Provinsi Jawa Tengah: suatu pendekatan dan perencanaan wilayah. Jurnal Agribisnis Indonesia. 2 (2) : 177-190.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Utami, L.S. 2015. Hubungan Karakteristik Peternak Dengan Skala Usaha Ternak Kerbau di Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Skripsi. Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.